

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tanda Tangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran PPAS APBD 2025



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/07/13/7dc8cc79-22b0-4ffe-bcdd-f7479e1024f2.jpeg.webp>

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (Wabup HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Mansyah Sabri menandatangani dokumen pakta integritas kepala daerah terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) HST Tahun Anggaran 2025.

“Secara umum, kebijakan penyusunan APBD memuat kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan,” kata Mansyah di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Sabtu. Fahmi mengapresiasi Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah yang sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA-PPAS 2024.

Penandatanganan pakta integritas berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HST yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD HST pada Kamis (11/7).

Selain penandatanganan pakta integritas, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HST Taufik Rahman, dihadiri Wabup HST Mansyah Sabri, para anggota dewan, para asisten sekda, staf ahli bupati, hingga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab HST.

“Dalam Rancangan KUA PPAS 2025 ada merancang kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, tetapi perlu anggaran tahun jamak atau multiyears, yakni penyusunan terpadu bendungan pancur hanau,” ujar Mansyah.

Selain itu, kata dia, ada juga kegiatan dirancang yang pendanaan tahun jamak, yakni pembangunan jalan lingkar timur, hal ini dilakukan mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar yang tidak mampu didanai dalam satu tahun.

Mansyah menyampaikan rancangan tersebut sangat prioritas dan strategis bagi pengembangan perekonomian dan kewilayahan serta berdampak terhadap bargaining (tawar menawar) pendanaan yang besar dengan pemerintah pusat.

Wabup HST berharap pembahasan rancangan KUA PPAS 2025 antara pemerintah daerah dengan DPRD HST dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga jadwal penetapan RAPBD 2025 tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Setelah penyampaian Rancangan KUA PPAS 2025, dilanjutkan penandatanganan surat tanda terima penyampaian KUA PPAS 2025 dan pakta integritas.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Ketua Kabupaten DPRD Kabupaten HSS Haji Akhmad Fahmi (HAF) didampingi Wakil Ketua II Muhammad Kusasi memimpin Rapat Paripurna Rancangan KUA-PPAS yang disampaikan Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah di Kandangan, Kamis.

"Kami mengapresiasi Pemkab HSS yang sudah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PAAS 2024, Alhamdulillah Pemkab HSS sudah menyampaikan rancangan perubahan KUA-PAAS ini," kata HAF.

HAF berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tidak lama, sehingga selesai dengan cepat.

Sementara itu, Pj Bupati HSS Hermansyah mengatakan pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp1.097.209.122 atau 0,07 persen dengan total pendapatan menjadi Rp1.645.225.026.558.

"Proporsi dari peningkatan total pendapatan tersebut terdiri dari peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan sebesar 2,17 persen, disumbang dari pajak daerah dan retribusi daerah," tutur Hermansyah.

Untuk rekening lain PAD yang sah mengalami pengurangan karena penyesuaian kode rekening BLUD dipindah ke retribusi daerah, dan pos lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 juga dapat dilakukan dengan penambahan pada program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga beberapa penyesuaian perlu dilakukan.

Penyesuaian dimaksud antara lain pada Dana Alokasi Khusus (DAK), penyesuaian pada beberapa anggaran sosial kemasyarakatan dan bidang kesehatan.

"Saya berharap apa yang diajukan pihak eksekutif ini dapat diterima dan dibahas oleh pihak legislatif secepatnya, agar bisa segera pula diterapkan pada anggaran pembangunan kita di Pemkab HSS," harapnya. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), H Mansyah Sabri, menandatangani pakta integritas terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HST di ruang rapat paripurna DPRD HST Lantai 2, Kamis (11/7/2024).

Selain penandatanganan Pakta Integritas, Rapat Paripurna juga mengagendakan penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HST, Taufik Rahman, dan dihadiri oleh Wabup HST, para anggota dewan, para asisten sekda, staf ahli bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab HST.

Dalam rapat tersebut, Wabup HST memaparkan kebijakan penyusunan APBD yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Wabup HST menyampaikan bahwa dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025, ada kegiatan yang memerlukan anggaran tahun jamak atau multiyears, seperti penyusunan terpadu bendungan Pancur Hanau dan pembangunan jalan lingkaran timur. Kegiatan ini dirancang karena membutuhkan anggaran yang besar dan tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun.

"Rancangan tersebut sangat prioritas dan strategis bagi pengembangan perekonomian dan kewilayahan serta punya dampak bargaining pendanaan yang besar dengan Pemerintah Pusat," ungkap Wabup HST.

Wabup berharap pembahasan rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga jadwal penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2025 tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Setelah penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025, dilakukan penandatanganan surat tanda terima penyampaian KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Pakta Integritas.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420837/wabup-hst-tanda-tangani-dokumen-kebijakan-umum-anggaran-ppas-apbd-2025>, Wabup HST tanda tangani dokumen kebijakan umum anggaran PPAS APBD 2025, (13/07/2024).
2. <https://hstmurakata.com/wabup-hst-tandatangani-pakta-integritas-dan-sampaikan-rancangan-kua-ppas-apbd-2025/>, Wabup HST Tandatangani Pakta Integritas dan Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD 2025, (12/07/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan